



## PERAN PENDIDIKAN DALAM PROSES *PEACEBUILDING* DI SIERRA LEONE

Ulfah Fatmala Rizky

Prodi Administrasi Publik

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[ulfah.fatmalarizky@uta45jakarta.ac.id](mailto:ulfah.fatmalarizky@uta45jakarta.ac.id)

**Abstract,** *This paper intends to describe the conflict that occurred in Sierra Leone which resulted in the Complex Political Emergency (CPE) condition and the role of education in the peacebuilding process in Sierra Leone. This condition has reduced the Human Development Index in the country. In order to raise the Human Development Index in Sierra Leone, the conflict must end immediately. One of the ways to end the conflict is by doing peacebuilding. The peacebuilding process can be done through education. In addition, by increasing access to education or rebuilding the education system. The five roles of education in the peacebuilding process, namely: first, skills training that offers a new way of life apart from violence. Second, education protects children. Quality education will provide physical, psychosocial, and cognitive protection for children. Third, education helps rebuild 'normality' and self-confidence. Fourth, education helps restore social capital that has been lost and damaged by prolonged conflict. Fifth, education contributes to social transformation. Through the literature study method, this paper found that educational interventions in Sierra Leone have a positive impact on the peacebuilding process.*

**Keywords:** *conflict, role of education, peacebuilding*

**Abstrak,** Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan konflik yang terjadi di Sierra Leone yang melahirkan kondisi *Complex Political Emergencies* (CPE) dan bagaimana peran pendidikan dalam proses *peacebuilding* di Sierra Leone. Di mana kondisi ini telah menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Negara tersebut. Untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Sierra Leone maka konflik harus segera diakhiri. Salah satu cara untuk mengakhiri konflik adalah dengan melakukan *peacebuilding*. Proses *peacebuilding* dapat dilakukan melalui pendidikan. Selain itu, dengan meningkatkan akses pendidikan atau membangun kembali sistem pendidikan. Lima peran pendidikan dalam proses *peacebuilding*, yaitu: pertama, pelatihan ketrampilan yang menawarkan jalan kehidupan baru selain kekerasan. Kedua, pendidikan melindungi anak-anak. kualitas pendidikan akan memberikan perlindungan fisik, psikososial, dan juga kognitif bagi anak-anak. Ketiga, pendidikan membantu membangun kembali 'normalitas' dan kepercayaan diri. Keempat, pendidikan membantu untuk memperbaiki modal sosial yang hilang dan rusak akibat konflik yang berkepanjangan. Kelima, pendidikan berkontribusi pada transformasi sosial. Melalui metode studi kepustakaan, tulisan ini menemukan bahwa intervensi pendidikan di Sierra Leone memberikan dampak positif terhadap proses *peacebuilding*.

**Kata kunci:** konflik, peran pendidikan, pembangunan perdamaian

## PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Sierra Leone sangat berdampak pada ketidakefektifan pembangunan manusia di Negara yang diasosiasikan dengan istilah ‘Blood Diamonds’ tersebut. Negara ini memiliki gini koefisien sebesar 35,4 dan menduduki peringkat ke-183 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian tersebut membuat IPM Sierra Leone berada sepuluh peringkat di bawah Ethiopia, yang memiliki gini koefisien sebesar 33,6 (UNDP, 2013). Portal berita BBC News (2018) mencatat alur waktu kejadian-kejadian penting yang terjadi di Sierra Leone, termasuk perang sipil dan junta militer yang berlangsung sejak tahun 1991 hingga 1999, dan mendapatkan intervensi perdamaian dan rekonsiliasi dari PBB pada pertengahan tahun 1999 hingga sekitar tahun 2004. Pada tahun 2002, perang di Sierra Leone secara resmi dinyatakan berakhir. Melalui studi literatur, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses *peace-building* yang dilakukan di Sierra Leone yang berada pada CPE melalui penyediaan layanan pendidikan.

Sierra Leone menjadi tanah surga bagi para investor ataupun pengusaha berlian di dunia. Pada tanggal 16 Maret 2017, seorang pastor bernama Emmanuel Momoh, menyerahkan berlian utuh senilai lima puluh juta Poundsterling atau Rp814,53 miliar kepada Presiden Sierra Leone, Ernest Bai Koroma (Hargreaves, 2017). Penemuan berlian kedua terbesar di Sierra Leone ini juga diwartakan oleh banyak media massa dalam jaringan, salah satunya adalah CNN, yang mewartakan bahwa berlian 706 karat tersebut ditemukan di Distrik Kono (Karimi, 2017). Selain berlian, Sierra Leone juga kaya akan mineral dan batu berharga lainnya seperti bauksit, besi baja, emas, serta rutil dan ilmenit. Kondisi ini tidak hanya menarik para investor atau pengusaha asing, tetapi juga para politisi yang memiliki kekuatan militer di Sierra Leone, sehingga melahirkan konflik berkepanjangan dan membawa negara ini pada kondisi CPE.

Secara historis, sistem pendidikan di Sierra Leone merupakan warisan dari masa penjajahan. Sistem pendidikan di Sierra Leone merupakan contoh pertama sistem pendidikan gaya barat di Sub-Sahara Afrika, sekolah khusus untuk laki-laki pertama kali didirikan pada tahun 1845 dan sekolah khusus untuk perempuan pertama kali diidrikan pada tahun 1849 (UNICEF, 2011b). UNICEF (2011a) menjelaskan bahwa kondisi pendidikan di Sierra Leone berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan

konflik yang terjadi di Sierra Leone karena sejumlah alasan, yaitu: pertama, akses pendidikan di Sierra Leone sangat elitis dan eksklusif, oleh karena itu pendidikan hanya dapat diakses oleh kelompok menengah ke atas dan di wilayah tertentu saja. Selain itu, walaupun terdapat sekolah untuk perempuan, pada kenyataannya hanya sedikit perempuan yang mengakses pendidikan di sekolah. Kedua, tingginya angka putus sekolah yang mencapai 30% dari populasi sekolah. Kondisi ini lebih buruk pada daerah pedesaan yang dapat mencapai 70% (Women's Commission for Refugee Women and Children dalam Novelli & Higgins, 2016) Ketiga, banyak sekolah yang terletak di daerah terpencil dan membuat guru-guru mengalami kesulitan mobilitas. Keempat, 50% anggaran pendidikan merupakan dana bantuan dari pihak luar (bukan dari anggaran pemerintah). Kelima, kapabilitas menteri pendidikan yang tidak mumpuni. Keenam, rendahnya gaji dan moral para guru. Ketujuh, 40% dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tinggi.

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, terutama di Negara-negara pascakonflik dan Negara-negara yang rentan konflik (Twort, 2018). Sejumlah penelitian terdahulu telah menemukan bahwa pendidikan berperan positif dalam kesuksesan proses *peacebuilding* pascakonflik, seperti Gill & Niens (2014) yang menemukan bahwa pendidikan yang berorientasi pada humanisasi dan dialog kritis dapat menawarkan strategi pedagogis dan memberikan kerangka konseptual yang menarik untuk proses *peacebuilding*. Samura (2013) menyarankan bahwa pendidikan di Negara-negara Afrika yang mengalami konflik, seperti Sierra Leone, seharusnya menggunakan pendekatan pendidikan untuk membangun kembali masyarakatnya. Selain itu, pendidikan juga tidak boleh dipisahkan dari konteks atau kondisi masyarakatnya. Selain di Negara-negara Afrika, peran positif pendidikan dalam proses *peacebuilding* juga ditemukan di Negara-negara lain seperti Bosnia dan Denmark. Nelles (2006) menemukan bahwa nilai-nilai pendidikan telah membantu proses *peacebuilding* di Bosnia walaupun temuan ini tidak mudah untuk digeneralisir. Klein (2018) menyampaikan bahwa pendidikan nonformal melalui sekolah-sekolah rakyat (*folk schools*) di Denmark mampu mendorong proses *peacebuilding*. Kondisi pendidikan di Sierra Leone dan sejumlah hasil penelitian yang menemukan adanya hubungan positif antara pendidikan dan *peacebuilding* mendorong

organisasi-organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk melakukan intervensi dalam proses *peacebuilding* di Sierra Leone.

## **KAJIAN TEORITIS**

### ***Complex Political Emergencies (CPE)***

Goodhand & Hulme (1999) menjelaskan bahwa konflik adalah perjuangan antara individu atau kolektivitas atas nilai-nilai atau klaim atas status atau kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan dari pihak yang berkonflik adalah untuk menegaskan nilai atau klaim masing-masing. CPE adalah krisis kemanusiaan di suatu Negara, wilayah, atau masyarakat di mana terdapat gangguan yang cukup besar terhadap kewenangan pemerintah yang diakibatkan oleh konflik internal atau eksternal dan membutuhkan tanggapan internasional (OCHA, 1999). Istilah CPE bukan merupakan suatu alat analisis melainkan suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan suatu konflik yang memiliki dampak atau kondisi yang rumit (kompleks). Ciri-ciri suatu Negara mengalami CPE, yaitu: pertama, konflik yang terjadi di dalam dan lintas Negara. Kedua, konflik memiliki kausalitas politik. Ketiga, konflik yang terjadi tidak dapat dipastikan waktu berakhirnya (berlarut-larut). Keempat, terjadi perpecahan sosial dalam masyarakat. Kelima, konflik dapat menciptakan *predatory social formation* di mana suatu kelompok sosial di suatu negara mulai merasa antipati terhadap kelompok sosial lainnya yang juga tinggal di negara tersebut (Goodhand & Hulme, 1999).

### ***Peacebuilding***

Secara harfiah, *peacebuilding* diterjemahkan sebagai pembangunan perdamaian, yang mana hal ini dapat diartikan bahwa *peacebuilding* merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menghentikan suatu pertikaian atau konflik. Goodhand & Hulme (1999) mendefinisikan *peacebuilding* sebagai promosi langkah-langkah kelembagaan dan sosial ekonomi, di tingkat lokal atau nasional, untuk mengatasi penyebab utama konflik. Istilah *peacebuilding* merupakan istilah yang umum dan sering digunakan secara luas untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi atau menyelesaikan kekerasan, konflik, dan segala bentuk kegiatan yang berpotensi pada kekerasan. Konsep *peacebuilding* fokus pada perubahan perilaku dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Konsep *peacebuilding* dibangun atas sejumlah premis, yaitu: pertama, perdamaian membutuhkan transformasi sosial dan harus dibangun berkali-kali.

Kedua, perdamaian meliputi masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan. Ketiga, *peacebuilding* bukanlah peristiwa dengan awal dan akhir yang tepat, melainkan mengacu pada proses yang terjadi sebelum, selama, dan setelah konflik kekerasan. Keempat, *peacebuilding* bukanlah suatu aksi yang spesifik melainkan konsekuensi dari suatu aksi. Kelima, masyarakat yang mengalami konflik merupakan bagian dari proses *peacebuilding*.

### **Pendekatan Pendidikan dalam Proses *Peacebuilding***

Ellison (2012) menyampaikan lima peran pendidikan dalam proses *peacebuilding*, yaitu: pertama, pelatihan ketrampilan yang menawarkan jalan kehidupan baru selain kekerasan. Kedua, pendidikan melindungi anak-anak. Kualitas pendidikan akan memberikan perlindungan fisik, psikososial, dan juga kognitif bagi anak-anak. Ketiga, pendidikan membantu membangun kembali 'normalitas' dan kepercayaan diri. Keempat, pendidikan membantu untuk memperbaiki modal sosial yang hilang dan rusak akibat konflik yang berkepanjangan. Kelima, pendidikan berkontribusi pada transformasi sosial.

### **METODE PENELITIAN**

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Studi kepustakaan yang juga disebut sebagai *literature review* juga digunakan dalam penelitian lapangan sebagai panduan untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian teoretis. Zed (2008) menyampaikan bahwa penelitian kepustakaan tidak memerlukan studi lapangan untuk memperoleh data penelitian, metode penelitian ini mendapatkan data penelitian dari sumber-sumber perpustakaan yang dapat berupa artikel ilmiah, majalah, koran, tugas akhir, dan sebagainya. Namun demikian, studi pustaka tidak hanya meliputi kegiatan membaca dan mencatat sumber pustaka yang ditemukan tetapi juga terkait dengan metode pengumpulan data dan pengolahan bahan penelitian. Terdapat tiga faktor pendorong dilakukannya penelitian kepustakaan, yaitu: pertama, data penelitian tidak mungkin didapatkan dari penelitian lapangan. Kedua, studi yang dilakukan merupakan studi pendahuluan. Ketiga, data yang didapatkan dari sumber-sumber perpustakaan dapat menjawab masalah penelitian (Zed, 2008). Selain itu, Zed (2008) juga menyampaikan empat ciri utama studi kepustakaan, yaitu: pertama, peneliti langsung berhadapan

dengan teks ataupun data-data kuantitatif yang sudah terdokumentasikan, dalam hal ini peneliti tidak mencari sendiri data-data tersebut di lapangan. Kedua, data yang digunakan adalah data yang siap digunakan dan bukan data mentah. Ketiga, pada umumnya data pustaka merupakan sumber data sekunder. Keempat, data pustaka adalah data statis yang tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Berdasarkan ciri dan fungsi dari studi kepustakaan tersebut, maka metode studi kepustakaan cocok digunakan dalam penelitian ini karena faktor geografis dan keamanan tidak memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian lapangan di Sierra Leone.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Zack-Williams (1999) dalam artikel jurnalnya menuliskan bahwa kekerasan yang terjadi di Sierra Leone merupakan alat penting untuk melanggengkan kekuasaan Pemerintah atau politisi penting di Sierra Leone. Melalui penelitiannya, Zack-Williams (1999) mencoba untuk memetakan faktor-faktor penyebab kontestasi politik, yang membawa Sierra Leone pada kondisi CPE. Menurutnya, untuk memahami konflik yang terjadi di Sierra Leone penting untuk melihat kembali sejarah politik Negara tersebut. Negara yang merdeka pada tahun 1961 ini puluhan tahun telah berada di tangan Pemerintah otoritatif, yang menggunakan kekuatan militer sebagai kekuatan pendukungnya. Ini merupakan kondisi korosif, yang merusak tatanan sosial dan akuntabilitas demokrasi di Sierra Leone. Kandeh dalam Zack-Williams (1999) menyatakan bahwa :

*The 'governing class' in Sierra Leone has demonstrated its inability to 'secure the uncoerced compliance of subordinate strata to their rule. As a result, state legitimization has been premised not on establishing a 'state hegemonic project' by strengthening 'popular representatives institutions', but on the reinforcement of the oppressive state apparatus.*

Selain Pemerintahan dan aparatur Negara yang opresif, CPE yang terjadi di Sierra Leone juga disebabkan oleh budaya patrimonial yang berkepanjangan, dan akibat dari kondisi poskolonialisme. Kondisi ini mengantarkan Sierra-Leone pada keruntuhan struktur ekonomi dan politik (Richards dalam Zack-Williams 1999). Keuntungan pertambangan berlian yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit politik menyebabkan standard hidup rakyat Sierra Leone semakin menurun pada tahun 1980-an. Zack-Williams (1999) menyampaikan bahwa :

*It is also important to note that whatever benefit the country may have derived from mining was not equitably distributed. Politicians, powerful chiefs in the diamond-rich chiefdoms, and Lebanese traders made a fortune, but the ordinary Sierra Leonean standard of living continued to decline throughout the 1980s.*

Distribusi kekayaan Negara yang tidak adil tersebut tidak hanya membawa Pemerintah Sierra Leone pada masalah ekonomi yang lebih besar, tetapi juga menurunkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat Negara dalam politik Sierra Leone, tidak lain karena dimotivasi oleh keuntungan ekonomi, melalui pengamanan perusahaan-perusahaan pertambangan skala besar, yang berinvestasi di Sierra Leone. Ketidapuasan rakyat terhadap aparat Negara memunculkan tuntutan untuk menghapuskan subsidi beras bagi tentara, polisi, dan tahanan lembaga pemasyarakatan. Subsidi beras bagi aparat Negara yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Sierra Leone, dianggap sebagai pemborosan. Ini disebabkan besarnya pengeluaran Negara untuk mengimpor beras dari Asia Selatan yang mencapai USD 30 juta, sehingga jika Negara terus mensubsidi beras bagi aparat, maka pengeluaran tersebut akan jauh lebih besar. Tuntutan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Sierra Leone pada Januari 1997.

Ketidapuasan rakyat terhadap Pemerintah yang berkuasa juga melahirkan gerakan-gerakan militansi destruktif, ini menciptakan dua kubu kekuatan yang memperebutkan sumber daya di Sierra Leone, dan menjebak rakyat Sierra-Leone pada CPE. Konflik berkepanjangan ini berakibat sangat fatal pada anak-anak, yang sejatinya menjadi generasi penerus Sierra Leone, sehingga dapat berkontribusi membangun Negara tersebut. Hak anak-anak di Sierra Leone direnggut melalui rezim yang opresif. Rezim ini memaksa anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun untuk menjadi tentara serta mata-mata Pemerintah, dan melahirkan fenomena tentara anak. Tentara anak ini diambil secara paksa dari keluarga-keluarganya, dan jika keluarga mereka melawan maka keluarga tersebut akan dibunuh. Tentara anak ini dicabut hak pendidikannya dengan tidak diizinkan untuk bersekolah, dan diberikan pelatihan untuk membunuh masyarakat sipil, atau anggota kelompok lain yang dianggap lawan. Tidak hanya anak laki-laki yang menjadi korban, tetapi juga anak perempuan yang dipaksa untuk menjadi istri para tentara. The Woman's Commission for Refugee Women and Children menyampaikan bahwa sebanyak 80% tentara pemberontak adalah anak-anak berusia 7

hingga 14 tahun, dan dari mereka yang berhasil melarikan diri dari kamp pemberontakan tersebut, didapatkan informasi bahwa anak perempuan merupakan penghuni mayoritas kamp tersebut.

*Peacebuilding* diartikan sebagai sebuah proses yang memfasilitasi terciptanya kedamaian yang tahan lama, dan mencoba untuk mencegah terulangnya kekerasan yang pernah terjadi. Terdapat banyak pertanyaan kritis tentang kontribusi pendidikan terhadap proses *peacebuilding*. Meskipun demikian, masih terdapat sedikit teori tentang pendidikan seperti apa yang mampu menjadi bagian dari proses *peacebuilding*. Ellison (2012) dalam tulisannya menyebutkan bahwa terdapat lima program pendidikan yang diterapkan oleh PBB untuk proses *peacebuilding* di Sierra Leone. Kelima program pendidikan tersebut, yaitu : pertama, pelatihan ketrampilan yang menawarkan jalan kehidupan baru selain kekerasan. Melalui pembatasan persenjataan dan demobilisasi, pemberian pelatihan ketrampilan dimaksudkan untuk menghapus pelatihan persenjataan pada anak-anak, yang kemudian lambat laun akan menghapuskan peperangan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Sierra Leone dalam mencari nafkah, dengan cara berkontribusi melalui stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi. Ini juga merupakan proses reintegrasi yang akan berkesinambungan dengan proses *peacebuilding* (Paulson, 2009 dalam Ellison, 2012).

Kedua, pendidikan melindungi anak-anak. kualitas pendidikan akan memberikan perlindungan fisik, psikososial, dan juga kognitif bagi anak-anak di Sierra Leone (United Nation, 2009 dalam Ellison, 2012). Ketiga, pendidikan membantu membangun kembali 'normalitas' dan kepercayaan diri. Melalui pendidikan, anak-anak dapat merasakan kembali stabilitas, normalitas, dan kepercayaan diri. Selain itu, pendidikan formal juga merupakan simbol khusus yang memberikan dampak signifikan bagi banyak komunitas, yang dapat membantu untuk membangun kembali kepercayaan rakyat kepada Negara (James, 2010 dalam Ellison, 2012). Keempat, pendidikan membantu untuk memperbaiki modal sosial yang hilang dan rusak akibat konflik yang berkepanjangan. Ketika kesempatan akan pendidikan telah hilang akibat konflik, itu berarti tidak hanya individu yang hilang, tetapi juga modal sosial, dan kemampuan masyarakat untuk kembali pulih dari konflik (Smith, 2010 dalam Ellison, 2012). Kualitas pendidikan akan meningkatkan pemikiran kritis, dan analisis pilihan, yang pastinya akan mencegah seseorang untuk mengikuti pemimpin karismatik yang dapat

menjerumuskan ke dalam konflik (Save the Children, 2008 dalam Ellison, 2012). Kelima, pendidikan berkontribusi pada transformasi sosial. Mengusahakan sebuah ‘infrastruktur bagi perdamaian’ berarti kita berorientasi untuk membangun hubungan yang didasarkan pada totalitas dalam membentuk pola, proses, dan struktur baru.

Implementasi kelima program pendidikan tersebut di Sierra Leone telah membawa kesuksesan pada proses *peacebuilding*. Sierra Leone memberikan pengalaman empiris bahwa pendidikan mampu berkontribusi dalam proses *peacebuilding*. Sierra Leone merupakan negara dengan hubungan yang kompleks antara pendidikan dan konflik. Akan tetapi keberhasilan tersebut menuai beberapa kritik yang dilontarkan oada komunitas internasional. Pertama, para analis mengindikasikan bahwa komunitas internasional tidak mempelajari dampak dari program yang diimplementasikan sehingga dampak yang dihasilkan kurang optimal. Kedua, kemunculan isu yang telah dibentuk sebagai suatu cara untuk menangani isu-isu sosial di Sierra Leone sudah seharusnya dianggap sebagai hal yang penting dalam pembangunan Sierra Leone. Ketiga, kedua masalah tersebut dikombinasikan dengan keragu-raguan untuk menerapkan perubahan struktural yang luas, membawa kita pada pertanyaan, apakah ada komitmen sejati untuk mentransformasikan konflik melalui *peacebuilding*. Walaupun pada kenyataannya, analisis dari pilihan-pilihan rasional mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam proses *peacebuilding*. Hasil analisis dari kelima program pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa program-program tersebut tidak jauh berbeda dengan program-program pembangunan pada umumnya.

## **KESIMPULAN**

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Sierra Leone telah memunculkan kondisi CPE, konflik ini menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Negara tersebut. Kondisi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari tercabutnya hak pendidikan dan terbengkalainya akses pendidikan yang inklusif bagi anak-anak di Sierra Leone. Pemerintahan otoritatif yang disokong oleh kekuatan militer telah mengganggu tatanan sosial proses demokrasi di Sierra Leone, kondisi ini ditentang oleh kelompok revolusioner Sierra Leone (Revolutionary United Front/RUF). Selain itu, di bawah pemerintahan yang otoritatif, distribusi manfaat dari kekayaan Negara hanya dapat dirasakan oleh kelompok elit politik yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan

rakyat kepada pemerintah. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan segala macam pendekatan untuk proses *peacebuilding* di Sierra Leone, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah pendidikan. Telah banyak penelitian yang menemukan bahwa pendidikan mampu berkontribusi positif pada proses *peacebuilding*. Melalui pemanfaatan lima peran pendidikan yang disampaikan oleh Ellison (2012), Sierra Leone mampu melakukan *peacebuilding* setelah satu dekade konflik secara resmi diakhiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- BBC News. (2018). Sierra Leone profile-Timeline. Diambil 17 Desember 2020, dari BBC News website: <http://www.bbc.com/news/world-africa-14094419>
- Ellison, C. S. (2012). The role of education in peacebuilding: An analysis of five change theories in Sierra Leone. *Compare*, 44(2), 1–22. <https://doi.org/10.1080/03057925.2012.734138>
- Gill, S., & Niens, U. (2014). Education as humanisation: a theoretical review on the role of dialogic pedagogy in peacebuilding education. *Compare*, 44(1), 10–31. <https://doi.org/10.1080/03057925.2013.859879>
- Goodhand, J., & Hulme, D. (1999). From wars to complex political emergencies: Understanding conflict and peace-building in the new world disorder. *Third World Quarterly*, 20(1), 13–26. <https://doi.org/10.1080/01436599913893>
- Hargreaves, F. (2017). Christian pastor discovers a giant 706-carat diamond in Sierra Leone which could be the 10th largest ever found and worth more than £50 million. Diambil 17 Desember 2020, dari Mail Online website: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-4320300/Sierra-Leone-pastor-unearths-massive-706-carat-diamond.html>
- Karimi, F. (2017). Massive 706-carat diamond unearthed in Sierra Leone. Diambil 17 Desember 2020, dari CNN website: <https://edition.cnn.com/2017/03/17/africa/sierra-leone-massive-diamond-unearthed/index.html>
- Klein, M. (2018). Folk schools as inspiration for contemporary democratic peacebuilding. *Journal of Peacebuilding and Development*, 13(3), 70–85. <https://doi.org/10.1080/15423166.2018.1498374>
- Nelles, W. (2006). Bosnian education for security and peacebuilding? *International Peacekeeping*, 13(2), 229–241. <https://doi.org/10.1080/13533310500437621>

- Novelli, M., & Higgins, S. (2016). The violence of peace and the role of education: insights from Sierra Leone. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 47(1), 32–45. <https://doi.org/10.1080/03057925.2015.1119650>
- OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). (1999). *OCHA orientation handbook complex emergencies*. New York: OCHA.
- Samura, F. (2013). Peace education for reconstruction and peacebuilding in post - war African Societies. *African Conflict and Peacebuilding Review*, 3(2), 24–46. <https://doi.org/10.2979/africonfpeacrevi.3.2.24>
- Twort, L. (2018). An exploration of the narrative of education in Bo, Sierra Leone: A bottom-up perspective. *Peacebuilding*, 7(1), 88–102. <https://doi.org/10.1080/21647259.2018.1457233>
- UNDP. (2013). Income Gini coefficient. Diambil 17 Desember 2020, dari UNDP (United Nations Development Programme) website: <http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>
- UNICEF. (2011a). The role of education in peacebuilding: A synthesis report of findings from Lebanon, Nepal and Sierra Leone. In *UNICEF*. New York.
- UNICEF. (2011b). *The Role of Education in Peacebuilding*. New York.
- Zack-Williams, A. B. (1999). Sierra Leone: The political economy of civil war, 1991 - 98. *Third World Quarterly*, 20(1), 143–162.